

BERITA DAN ANALISIS
KESEHATAN GRATIS
DARI KORAN TRIBUN MAKASSAR

Selasa, 21-10-2008

Program Kesehatan Gratis, di Persimpangan Jalan?

Oleh: Aminuddin Syam

Masyarakat Sulawesi Selatan semakin penasaran menunggu realisasi janji program kesehatan gratis. Rasa penasaran masyarakat cukup beralasan sebab selama masa kampanye gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagu Arifin Nu'mang telah berjanji akan membawa perubahan signifikan khususnya terhadap kesehatan dan pendidikan di Sulawesi Selatan. Kesehatan dan pendidikan gratis menjadi salah satu "jualan" yang cukup memberi andil dalam meraup suara baik di kota maupun di desa.

Dan mungkin karena kedua faktor tersebut sehingga masyarakat memilihnya, dengan harapan bahwa kelak mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara Cuma-cuma. Dengan realitas tersebut mengindikasikan bahwa memang masalah kesehatan dan pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat yang fundamental.

Jika dicermati secara seksama, program kesehatan gratis yang dijanjikan oleh gubernur terpilih mungkin lebih sulit direalisasikan dibandingkan dengan program pendidikan gratis, sebab sangat jauh perbedaan antara program kesehatan gratis dengan program pengobatan gratis. Kalau yang dimaksud oleh gubernur terpilih adalah program pengobatan gratis maka sesungguhnya program tersebut bukan sesuatu yang baru dan istimewa.

Sebab program pengobatan gratis sebenarnya sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin yang diseluruh wilayah republik Indonesia. Sejak pemerintahan SBY-JK pemerintah telah mencanangkan program pengobatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).

Daya Tampung

Jadi tanpa diprogramkan pun oleh gubernur terpilih, masyarakat miskin sudah bisa menikmati pengobatan gratis di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Dan jika selama ini masih ada masyarakat miskin yang pernah ditolak oleh puskesmas atau rumah sakit mungkin disebabkan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh puskesmas atau rumah sakit atau karena puskesmas dan rumah sakit yang menolaknya daya tampungnya terbatas.

Lain halnya jika program kesehatan gratis, sebab mencakup bukan hanya pengobatan gratis tetapi keseluruhan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa terdapat perbedaan definisi antara kesehatan gratis dengan pengobatan gratis.

Kalau selama ini gubernur terpilih mendung-dung kesehatan gratis maka konsekuensinya adalah segala hal yang terkait dengan kesehatan perlu digratiskan. pelayanan kesehatan menurut (Aswar, 1988) yakni setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok serta masyarakat.

Karena itu, masalah kesehatan gratis yang dijadikan "jualan" oleh gubernur Stahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang mestinya mencakup empat komponen, diantaranya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat (health promotion), pencegahan terhadap penyakit (prevention), pengobatan bagi yang menderita sakit (curative), dan rehabilitasi atau pemulihan bagi yang telah melakukan perawatan (rehabilitation).

Pada aspek peningkatan (promosi) derajat kesehatan masyarakat, pemerintah dituntut tidak hanya sekedar "memprovokasi masyarakat" untuk hidup sehat tetapi menjadi kewajibannya untuk menyiapkan dana yang memadai untuk proses peningkatan kesehatan masyarakat. Karena perlu diketahui perbandingan antara orang yang sehat dengan orang sakit sekitar 85 persen berbanding 15 persen.

Selama ini, pemerintah melalui dinas kesehatan selalu diskriminatif terhadap alokasi anggaran kesehatan. Umumnya alokasi lebih diprioritaskan kepada anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan orang sakit sedangkan anggaran untuk meningkatkan dan mencegah agar masyarakat tidak sakit cenderung terabaikan. Padahal, mestinya alokasi anggaran disesuaikan dengan proporsi masyarakat antara yang sehat dengan yang sakit.

Saat ini, sudah sekitar setengah tahun periode kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang telah berlalu, sebagian masyarakat Sulawesi Selatan telah melupakan janji-janji yang pernah dilontarkan pada saat kampanye, dan sebagian lainnya menunggu realisasi janji berupa program kerja kongkrit.

Perbedaan Persepsi

Salah satu janji yang paling dinantikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah tentang kesehatan dan pendidikan gratis. Dua jenis janji tersebut memang menjadi program andalan sehingga bisa memenangkan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 - 2013.

Untuk pelaksanaan janji pendidikan gratis relatif telah terlaksana dengan baik dan masyarakat sudah menikmati, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Ada beberapa komponen sehingga pendidikan gratis dapat direalisasikan.

Pertama, pendidikan gratis dapat didefinisikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua kalangan tanpa ada perbedaan persepsi. Kedua, jumlah siswa yang akan diberi bantuan pendidikan gratis relatif bisa diestimasi. Ketiga, Pengelola pendidikan khususnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan relatif paham tentang kondisi dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Selain itu, kadis pendidikan memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah kabupaten/ kota sehingga dengan mudah merealisasikan program pendidikan gratis. Ketempat, Bantuan dana pendidikan berupa dana BOS, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi Umum (DAU) berjalan di seluruh Kabupaten sebelum adanya program pendidikan gratis oleh gubernur sehingga pihak provinsi tinggal melengkapi subsidi yang belum tercover.

Dengan keberhasilan Gubernur Yasin Limpo/Agus Arifin Nu'mang merealisasikan pendidikan gratis paling tidak telah membawa dampak berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk kepentingan pembayaran biaya pendidikan, yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Jika dana tersebut disubstitusi untuk kepentingan lain seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , atau pembelian bahan makanan yang bergizi maka tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak atau mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Sedangkan untuk program kesehatan gratis cenderung di persimpangan jalanjalan dan mungkin bisa menjadi bantu sandungan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang. Apalagi pada masa kampanye yang lalu pasangan gubernur/wakil gubernur berkomitmen untuk mundur sebagai Gubernur/wakil gubernur jika program kesehatan gratis tidak bisa direalisasikan.

Jika dicermati secara seksama maka paling tidak terdapat delapan penyebab sehingga program kesehatan gratis menjadi tidak terealisasi sesuai yang diharapkan masyarakat.

Masyarakat Awam

Pertama, konsep kesehatan gratis yang dicanangkan oleh gubernur/wakil gubernur dapat diinterpretasi secara berbeda-beda, paling tidak di antara kalangan akademisi yang mengerti kesehatan dengan masyarakat awam.

Bagi kalangan akademisi kesehatan gratis yang dijanjikan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang sesungguhnya bukan kesehatan gratis tetapi hanya sebatas pengobatan gratis. Karena kesehatan dalam pandangan akademik adalah meliputi promosi kesehatan, pencegahan kesehatan(preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Kedua, sangat jelas bahwa Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang melemparkan janji kesehatan gratis tanpa memiliki evidence base. Akibatnya baik jumlah alokasi anggaran maupun mekanisme pelaksanaan di lapangan belum bisa terumuskan secara rinci.

Karena sampai saat ini, belum ada satu pun konsep yang disepakati baik oleh pakar di bidang kesehatan maupun dari dinas kesehatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi untuk dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kebanyakan.

Ketiga, adanya konflik kepentingan di dalam lingkungan dinas kesehatan karena sampai saat ini kepala dinas kesehatan provinsi statusnya hanya sebatas pelaksana tugas sehingga cenderung tidak sungguh-sungguh untuk merumuskan konsep yang baku karena jangan sampai konsep sudah jadi kemudian yang bersangkutan langsung diganti. Begitu pula mungkin sudah ada kalangan yang sudah memiliki konsep tetapi belum mau mengekspose konsepnya sebelum ditunjuk menjadi kepala dinas.

Keempat, Kemampuan memprediksi jumlah orang yang akan sakit dan dirawat di rumah sakit atau puskesmas sangat sulit sehingga pengalokasian anggaran untuk pengobatan juga tidak bisa dipastikan jumlahnya.

Kelima, Adanya resistensi kalangan tenaga medis dan paramedis dalam menjalankan pengobatan gratis karena ketidakjelasan kompensasi yang didapatkan jika konsep kesehatan gratis dilaksanakan di tingkat puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Keenam, pada masa kampanye Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang beserta dengan tim kampanyenya tidak pernah sekalipun mengungkapkan pembatasan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan pengobatan gratis. Akibatnya, kalangan orang yang tidak miskin pun juga merasa berhak

untuk mendapatkan pengobatan gratis jika mereka sakit sehingga wajar saja kalau jumlah orang sakit yang memanfaatkan fasilitas pengobatan gratis semakin bertambah.

Ketujuh, Kurangnya atensi gubernur dalam mengkoordinasikan program kesehatan gratis kepada seluruh kalangan terkait terutama pakar kesehatan dari perguruan tinggi, sehingga terkesan program kesehatan gratis hanya dibutuhkan oleh gubernur dan kalangan orang sakit.

Kedelapan, Gubernur/wakil gubernur perlu mencermati secara seksama alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsek karena selama ini sangat banyak dana yang dialokasikan ke dinas kesehatan baik yang berasal dari APBN maupun APBD namun jumlah orang yang sakit di Sulawesi Selatan tidak pernah berkurang secara signifikan.

Meskipun pihak pemerintah propinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Biro Humas Pemrov Sulsek telah membantah bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan program kesehatan gratis, namun fakta lapangan tidak bisa terbantahkan, paling tidak kematian Nasar di Puskesmas Bara-baraya pada beberapa bulan lalu adalah bukti bagaimana kesehatan gratis telah menelan korban.

Agar konsep kesehatan gratis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang perlu meredefenisi konsep yang dimaksud atau paling tidak memperjelas definisi operasional kesehatan gratis yang dimaksud.

Promosi Kesehatan

Karena kalau bertahan pada konsep kesehatan gratis maka tidak ada alasan untuk tidak menyediakan alokasi anggaran kepada orang sehat sehingga tidak menjadi sakit dan tetap produktif. Anggaran itu meliputi promosi kesehatan, pencegahan kesehatan (preventive), Pengobatan (curative) dan pemulihan kesehatan (rehabilitation).

Untuk promosi kesehatan, paling tidak Gubernur/wakil Gubernur menyediakan fasilitas olah raga ditempat-tempat yang terjangkau oleh masyarakat umum dan menjadi motor penggerak untuk untuk secara bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan olah raga secara rutin baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat umum.

Selain itu, perlu ada keberanian untuk membuat regulasi tentang larangan merokok di seluruh wilayah Sulsek sehingga bisa menjadi propinsi bebas asap rokok. Karena dengan regulasi larangan merokok paling tidak bisa menekan angka kesakitan bagi golongan masyarakat miskin yang paling banyak kecanduan rokok.

Sedangkan untuk pencegahan penyakit dapat dimulai dari pelayanan medik yang bertujuan untuk mencegah kesakitan, seperti imunisasi lengkap kepada seluruh bayi dan balita yang ada di Sulsek, keluarga berencana dan pemeriksaan kesehatan pribadi, hingga pelayanan kesehatan preventif yang lebih luas seperti pelayanan perlindungan anak yang memiliki risiko abuse.

Kalau gubernur dan wakil gubernur mampu mengoptimalkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit maka biaya untuk pengobatan dan rehabilitatif dapat diminimalisir.

Selain itu, jumlah masyarakat yang sehat semakin banyak dan peluang untuk melaksanakan kegiatan yang produktif yang bisa meningkatkan PAD dan PDB Sulsek semakin terbuka lebar, yang pada

akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bisa melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi lainnya. Dan yang lebih penting adalah Human Development Indeks (HDI) masyarakat Sulawesi Selatan semakin baik dan meningkat.

Tetapi jika janji-janji tersebut tidak terealisasi khususnya kesehatan gratis, maka paling tidak akan berimplikasi baik pada figur Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu'mang maupun kepada partai pengusungnya, masyarakat akan memberikan hukuman terutama kepada partai pengusungnya berupa tidak memilih pada saat pemilihan calon legislatif atau pemilihan presiden yang akan datang. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada statemen dari pejabat pemerintah propinsi yang berapologi bahwa karena baru enam bulan "berkuasa" sehingga kesehatan gratis belum bisa dilaksanakan dan menunggu waktu secara bertahap karena ungkapan seperti itu sangat potensial untuk merugikan gubernur dan wakil gubernur serta partai pengusungnya.

Penulis adalah Ketua Jurusan Gizi, FKM Unhas Makassar

Jumat, 17-10-2008

Kesehatan Gratis RI Disambut Antusias di Tinumbu

PROGRAM kesehatan gratis duet kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota usungan PPP-PAN Ridwan Syahputra Musagani-Irwan A Paturusi (RI) terus berlanjut.

Kamis (16/10), program kesehatan gratis RI berlangsung di Jl Tinumbu, Makassar. Sekitar 200 warga ikut menikmati pelayanan dan pengobatan cuma-cuma tersebut.

"Kita terus melanjutkan program itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya berjanji, tapi langsung mengimplementasikannya," kata Irwan yang juga adik kandung Rektor Unhas Prof Idrus Paturusi ini.

Tim kerabat RI, Wati, mengatakan, warga sangat antusias mengikuti kesehatan gratis tersebut. Mereka merasa bersyukur dengan adanya pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh tim RI.

Tim RI melibatkan sedikitnya enam tim medis untuk memberikan pelayanan dan pengobatan kepada warga yang memeriksakan kesehatannya.

Hari ini, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis itu akan dilanjutkan di daerah-daerah pinggiran, khususnya di kantong-kantong masyarakat miskin kota yang sangat memerlukan pengobatan tapi tidak sanggup karena biaya.

Kamis, 16-10-2008

Rp 1,2 Miliar untuk Kesehatan Gratis di Barru Barru,

Tribun - Pemerintah Kabupaten Barru menganggarkan sekitar Rp 1,2 miliar dalam APBD Perubahan 2008 untuk mewujudkan program kesehatan gratis di daerah ini. Langkah ini juga upaya mendukung program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai pelayanan kesehatan gratis sejumlah pusat kesehatan

masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu), serta sarana kesehatan lainnya hingga rumah sakit kelas III," jelas Kepala Dinas Kesehatan Barru, Zainal Mustaqin Hamid, dalam situs pemerintah setempat, Selasa (14/10).

Dana Rp 1,2 miliar itu hingga Desember. Ditambahkan, selain dana dari APBD tersebut, program kesehatan gratis itu juga didukung dengan kucuran dana dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Program pelayanan kesehatan gratis sudah dimulai di Barru sejak 1 Juli 2008 lalu. "Masyarakat kurang mampu sudah bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis ini tanpa ada pungutan sedikitpun sepanjang sesuai dengan petunjuk teknis," katanya.

Sabtu, 04-10-2008

Pemprov: Gubernur Konsisten dengan Kesehatan Gratis Makassar,

Tribun - Menanggapi pernyataan sejumlah kalangan yang meminta Gubernur Syahrul mundur karena tidak konsisten dengan programnya, khususnya kesehatan dan pendidikan gratis ditanggapi hangat oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

Melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Jufri Rahman yang menggelar konferensi pers khusus di Hotel Clarion, Jumat (3/10), mengatakan, program kesehatan gratis dan pendidikan gratis sementara teraplikasi, jadi tidak ada alasan untuk menuntut gubernur mundur.

Lagi pula, kata Jufri, saat ini kepemimpinan Syahrul-Agus sebagai gubernur dan wakil gubernur baru enam bulan dan program itu sementara berjalan. Adapun janji gubernur yang menyatakan mundur dalam dua tahun jika programnya tidak berjalan itu sudah betul, namun saat ini program sementara berjalan dan tidak memiliki kendala berarti.

"Masih ada waktu satu setengah tahun untuk membenahi yang kurang. Dan kita membutuhkan kontribusi dan pemikiran pakar dan masyarakat yang konstruktif. Silahkan para pakar mengkritik tapi diharapkan pula mengemukakan solusi," katanya.

Pada kesempatan sama, Jufri yang didampingi Kabag Humas Hasan Basri Ambarala dan Kepala Seksi Pemberitaan Asrar Marlang meluruskan berita sebelumnya yang menyatakan Syahrul mengakui adanya masalah di sektor kesehatan gratis.

"Pak Syahrul tidak pernah mengatakan kesehatan gratis itu bermasalah. Beliau hanya mengemukakan bahwa kesehatan gratis memiliki kendala sehingga perlu dievaluasi. Pasalnya, anggaran meningkat mulai 20 persen hingga 30 persen," jelas mantan kepala Biro Dekonsentrasi ini.

Saat memberi sambutan di acara Badan Amil Zakat (BAZ) beberapa hari lalu. Syahrul mengatakan program kesehatan gratis perlu dievaluasi karena anggaran meningkat lantaran banyaknya pasien yang rawat inap. "Namun, naik sampai 40 persen pun tidak ada masalah, kita akan atasi demi rakyat. Tuhan pasti menunjukkan kita jalan jika membantu kaum dhuafa," kata Syahrul ketika itu.

Ia mencontohkan anggaran Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo meningkat dari Rp 8 miliar hingga Rp 12 miliar. "Tapi tidak apa-apa. Itu kecil. Insya Allah rezeki datang dari mana saja asalkan kita tulus dan ikhlas membantu rakyat kecil, pasti Tuhan memberikan bantuan. Siapa lagi yang bisa bantu kaum dhufa kalau bukan dokter yang sudah punya mobil dan motor," kata Syahrul dalam sambutan lepasnya ketika itu.

Kesehatan dan Pendidikan Aman

MELALUI teleconference, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Andi Patabai Pabokori menyatakan program pendidikan gratis tidak menuai masalah yang berarti. Pihaknya sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk tahap pertama. Total anggaran sekitar 193 miliar yang bakal dikucurkan dalam tiga tahap.

Saat ini, kata Patabai, anggaran sudah berada di kas daerah pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

Begitula dengan program kesehatan gratis. Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel dr Rahmat Jaya menyatakan program kesehatan gratis tidak menuai masalah.

"Sampai saat ini belum ada komplain dari daerah sebab anggaran sudah didrop di kas daerah, sisa pihak rumah sakit atau puskesmas yang mengklaimnya sesuai kebutuhan mereka," jelasnya via telepon.

Jumat, 03-10-2008

Kesehatan Gratis Dilakukan Secara Bertahap

PADA waktu pertama kali menginjakkan kaki sebagai Gubernur di Kantor Gubernur Sulsel, Syahrul langsung melakukan briefing dengan seluruh jajarannya. Pada saat itu, Syahrul menegaskan program kesehatan gratis yang akan direalisasikan itu akan memakai metode asuransi kesehatan dengan presentase 10-15 persen.

Sama seperti program pendidikan gratis, penerapan janji utama kampanye pasangan berjuduk Sayang ini akan dilakukan bertahap hingga masa bakti lima tahun pemerintahan pasangan birokrat-politisi ini, tahun 2013.

Menurutnya, dua program yang dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye, diakuinya tidak seperti membalikkan telapak tangan, penerapannya harus dilakukan secara bertahap. Untuk menyukseskan program kesehatan gratis, ada tiga hal yang harus diefisienkan, yaitu, efisiensi pemerintahan, pelibatan sektor swasta, dan menggunakan asuransi.

Dalam hal efisiensi di jajaran pemerintahan, Syahrul merencanakan pemotongan biaya perjalanan dinas yang dianggap tidak efisien serta pemotongan dana penggunaan tunjangan peningkatan kinerja.

Selain itu, Syahrul juga berencana melibatkan sektor swasta untuk membantu program ini, dan terakhir adalah menggunakan asuransi kesehatan. Khusus untuk penggunaan asuransi kesehatan ini, Syahrul memprediksi akan mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya, banyak masyarakat yang harus dilayani sehingga anggaran untuk kesehatan gratis itu harus lebih banyak pula.

Selasa, 30-09-2008

Syahrul Akui Program Kesehatan Gratis Bermasalah Makassar,

Tribun - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengakui salah satu program andalannya saat berkampanye dulu, yakni kesehatan gratis, kini sedang mengalami masalah besar. Anggaran yang disiapkan untuk program kesehatan gratis semakin hari semakin membengkak. Kenaikan anggaran untuk program tersebut diperkirakan akan menguras sebagian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari pos lain. Gubernur dan jajarannya berencana melakukan rapat evaluasi khusus membahas program kesehatan gratis ini dalam waktu dekat. Meningkatnya anggaran kesehatan gratis tersebut diungkapkan oleh Syahrul saat berbicara di hadapan pengurus Badan Amin Zakat se-Sulsel di Baruga Sangiaseri, Gubernuran, Senin (29/9). Pernyataan tersebut juga diungkapkan Syahrul pada beberapa pertemuan sebelumnya. Menurut Syahrul, anggaran kesehatan gratis yang telah direncanakan sebelumnya meningkat sekitar 20-40 persen, dengan total anggaran sebesar Rp 12 miliar. Padahal sebelumnya, Pemprov hanya menganggarkan sebesar Rp 8 miliar.

Syahrul memperkirakan pembengkakan anggaran tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya warga yang ingin dirawat dengan menggunakan fasilitas gratis tersebut. Beberapa waktu lalu, Syahrul sempat melakukan kunjungan ke perawatan kelas III yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan gratis. Syahrul sempat kaget karena banyak pasien yang terlihat menggunakan ponsel.

Sabtu, 27-09-2008 | 12:24:15

Kwarnas Pramuka Dirikan 16 Posko Kesehatan Gratis

Laporan: PersdaNetwork

Jakarta, Tribun - Sejumlah posko didirikan untuk membantu para pemudik yang mengalami kesusahan. Salah satu pendiri posko yakni Kwarnas Pramuka menyediakan layanan kesehatan secara cuma-cuma.

Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Parni Hadi kepada di Jakarta, Sabtu (27/9), mengatakan, akan membuka sekira 16 posko layanan kesehatan gratis di Stasiun Senen. Stasiun Senen kini dipadati pemudik.

"Nantinya para petugas kami ini akan memberikan informasi, hiburan kepada anak-anak yang menangis karena berdesak-desakan. Ajak anak-anak bernyanyi, memberikan pendidikan, dan bantuan kepada pemudik terutama yang mengalami kesulitan," kata Parni.

Dia menambahkan, dalam peresmian posko kesehatan gratis ini, juga akan diberikan sekitar 200 bingkisan Lebaran kepada petugas kebersihan stasiun dan para dhuafa.

Menurut rencana, pemberian bingkisan secara simbolis akan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Farida Hatta. (*)

Selasa, 05-08-2008

Kesehatan Gratis Dibahas Tertutup di DPRD Makassar,

Tribun - Program unggulan Pemerintah Provinsi Sulsel, kesehatan gratis, Senin (4/8), dibahas tertutup, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV (kesejahteraan rakyat) DPRD Sulsel dengan dinas kesehatan dan sejumlah kepala rumah sakit dan unit kerja bidang kesehatan.

Tidak biasanya rapat dengar pendapat ditutup untuk wartawan. Rapat ini membahas kendala dan keluhan masyarakat. Hadir Kepala Dinas Kesehatan dr Saad Bustan dan seluruh direktur rumah sakit di bawah naungan pemerintah provinsi.

Usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Sulsel Dr Ruslan mengatakan, hasil rapat tersebut hanya menegaskan kepada pengelola rumah sakit agar tidak mempolitisasi pelayanan kesehatan gratis. Sebab, masih banyak keluhan warga mengenai tidak jalannya program tersebut.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga direkomendasikan untuk menyusun buku panduan teknis pelayanan kesehatan gratis. "Ini untuk menghilangkan kesan bahwa semua pelayanan dan pengobatan digratiskan, padahal tidak demikian," kata politisi Golkar ini.

Panduan bagi masyarakat itu penting. Peralannya, ada beberapa yang membutuhkan biaya. Misalnya, transfusi darah. "Kalau stok darah habis di rumah sakit, pasti pasien mencarinya di luar dan itu pasti bayar. Begitupula semua peralatan dan obat-obatan, kalau di luar rumah sakit pasti bayar," katanya. Itu semua perlu dijelaskan oleh masyarakat, termasuk gratisnya biaya rawat inap. Sebab, yang gratis hanya kelas tiga sedang kelas lainnya tetap membayar sesuai ketentuan. Itu pun, kata Ruslan, bagi warga yang menginap di kelas tiga harus memperlihatkan KTP dan administrasi lainnya, padahal banyak warga miskin yang belum punya memiliki administrasi tersebut.

Rabu, 30-07-2008

**Anggap Kesehatan Gratis Hanya Komoditi Politik
Penguhan Guru Besar Unhas, Prof Amran Razak**

Ruang Senat Universitas Hasanuddin (Unhas) bergemuruh. Tepuk tangan ratusan guru besar mengiringi pemaparan pidato resmi Prof Dr Amran Razak pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Selasa (29/7).

Puluhan aktivis, dosen, dan mahasiswa hanya bisa mengintip orasi Amran lewat layar lebar yang dipajang di luar ruang senat.

Hadir, antara lain, Dr Hamid Paddu, Husain Abdullah, Dr Rahman Qayyum, Aswar Hasan, Taqwa Yunus, dan Ilham Arief Sirajuddin.

"Sayang sekali Kak Syahrul (Syahrul Yasin Limpo/Gubernur Sulsel) tak hadir. Seandainya beliau hadir, bisa diklirkan (diperjelas) soal pelayanan kesehatan gratis," kata Amran usai memaparkan orasi setebal 44 halaman.

Amran menyampaikan orasi berjudul Kesehatan Gratis sebagai Komoditi Politik: Suatu Tinjauan Prospektif Pembiayaan Kesehatan di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Unhas. "Saya sangat risih dan geli tiap mendengar seorang politisi apalagi kandidat menyatakan 'kesehatan gratis'. Sebab secara ilmiah, itu mustahil diwujudkan. Kesehatan itu mahal," ujar Amran mengurai alasan mengangot tema kontroversial itu.

Jualan Politik

Dalam orasinya, Amran menjadi Sulsel sebagai studi. "Pelayanan 'kesehatan gratis' sebagai jualan politik di masa kampanye terkadang diartikan hanya sebatas jaminan untuk mendapat pengobatan secara terbatas berupa pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan rujukan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) plus rawat inap di kelas III," katanya.

Padahal, menurutnya, selama masa kampanye kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel tak pernah mengutarakan klasifikasi atau diskriminasi layanan.

"Mereka mengumbar janji program 'kesehatan gratis' yang bisa diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan secara cuma-cuma," ujarnya.

Kejadian serupa terjadi di Pemilu Gubernur Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, dan Jawa Timur.

"Selama ini, praktik layanan kesehatan gratis di tingkat kabupaten/kota relatif bisa dilaksanakan dengan berbagai kebijakan terutama karena cakupan penduduk dan wilayahnya relatif kecil serta hampir tak ada pesaing dari RSUD. Tetapi pada tingkat provinsi di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya," jelas Amran.

Menurut Amran, menyesatkan jika keberhasilan suatu kabupaten/kota dengan menerapkan best practice kabupaten/ kota tersebut di tingkat provinsi yang memiliki cakupan lebih luas dan kompleks dengan preferensi pelayanan kesehatan yang amat beragam.

Kebutuhan Dana

Selain faktor target layanan, Amran juga menemukan adanya perbedaan mengenai asumsi kebutuhan dana kesehatan gratis yang dibutuhkan dalam setahun.

Penelitian Amran menemukan, Tim Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mematok angka Rp 94,093 miliar.

Kemudian dalam Rapat Kerja Gubernur/ Wakil Gubernur dengan Muspida dan Walikota/Bupati se Sulsel) disebut, dana yang dibutuhkan untuk program itu sebesar Rp 204,232 miliar.

Lain lagi pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel dan Fakultas Kedokteran (FK) Unhas yang menyebut angka Rp 260 miliar. Sedangkan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel menghitung dana yang

dibutuhkan sebesar Rp 365,339 miliar.

"Bila kita menghitung total bantuan dana dibagi jumlah warga sesuai anggaran yang akan diajukan hasil Raker Gubernur/Wagub dgn Muspida Sulsel, maka hasilnya hanya Rp 3.844 per jiwa per bulan," jelas Amran.

Sedangkan hitungan yang sama untuk versi IDI FK Unhas, lanjutnya, Rp 4.893 per jiwa per bulan masih lebih rendah dari premi per kapitasi Askeskin sebesar Rp 5.000. Usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel untuk premi sebesar Rp 85.00 atau 9 dolar AS per orang per tahun atau Rp 7.083 per orang per bulan.

Apapun namanya, kata Amran, kesehatan gratis sebagai jualan politik merupakan tren baru yang cukup strategis sebagai program unggulan para kandidat.

Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mewanti-wanti agar para kontestan berhati-hati menggunakan tema kampanye kesehatan gratis.

Anak Lorong

Dalam orasinya, Amran juga bercerita soal perjalanan hidupnya. Kehidupan Amran identik dengan lorong. Oleh teman seangkatannya di Fakultas Ekonomi Unhas, Amran dikenal sebagai "anak lorong". "Kami ini adalah lorong. Pak Amran sudah sukses mengangkat citra anak lorong. Bahwa anak lorong pun bisa menjadi profesor," ujar Taqwa, teman sekolah Amran dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Amran menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu tahun 1983. Kemudian menuntaskan pendidikan magister Perencanaan dan Manajemen Kesehatan di Universitas Indonesia (UI) tahun 1990, dan menyelesaikan pendidikan doktor di Unhas tahun 2004.

"Itulah dia si anak lorong yang berani. Dia adalah tokoh demonstran yang paling disegani di Unhas era tahun 1980-an. Kini, beliau sudah profesor dan menjadi guru besar," kata sahabat Amran, Husain Abdullah, diamini Aswar Hasan dan Hamid Padu.

Tiga nama terakhir adalah dosen-dosen Unhas yang juga cukup dikenal di Sulsel.

Kamis, 24-07-2008

98.108 Jiwa di Barru Bisa Nikmati Kesehatan Gratis Barru,

Tribun - Sekitar 98.108 jiwa masyarakat Kabupaten Barru berhak memperoleh pelayanan kesehatan gratis mulai bulan Juli ini. Pemerintah setempat telah menganggarkan sekitar Rp 3 miliar ditambah bantuan dana pemerintah provinsi Rp 500 juta.

Alokasi tersebut untuk pelayanan kesehatan dasar secara gratis di sejumlah puskesmas. Selain di puskesmas, juga dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu (pustu), Rumah Sakit Umum Barru, serta sarana kesehatan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Zaenal Muttaqin Hamid, dalam rilis Pemkab Barru, belum lama ini.

Bupati Barru Muh Rum telah menginstruksikan kepada Kepala RSUD dan para kepala puskesmas untuk menerapkan program tersebut. Sementara untuk para camat, bupati meminta agar informasi ini disosialisasikan kepada masyarakat.

Dijelaskan, pelayanan kesehatan gratis atau ditanggung pemerintah meliputi rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat (UGD), persalinan, serta pelayanan rujukan. Bagi pasien rujukan, Pemkab setempat menanggung 60 persen biaya pelayanan.

Untuk pelayanan kesehatan dasar, dilakukan pada setiap hari kerja kecuali persalinan dan UGD akan dilayani selama 24 jam. Yang bisa mendapatkan pelayanan tersebut hanya warga yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan kesehatan dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga jika ingin berobat.

Pengawasan Warga

Wakil Bupati Barru Kamrir Dg Mallongi sendiri mengatakan, terkait dengan kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan gratis, ia mengharapkan agar masyarakat ikut mengawasi program pemerintah tersebut.

"Kalau ada macam-macam dalam pelaksanaannya supaya dilaporkan. Namun, masyarakat juga perlu memahami batasan-batasan mana yang digratiskan sesuai petunjuk teknis," kata Kamrir.

Minggu, 20-07-2008

Kesehatan Gratis, Adopsi Dokter Keluarga 101 Hari Kepemimpinan Syahrul Agus (6-habis)

PROGRAM kesehatan gratis yang digagas Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan wakilnya, Agus Arifin Nu'mang, masih terus digulirkan.

Namun hingga 101 hari pemerintahan pasangan yang diusung koalisi PAN, PDK, PDIP, dan PDS ini belum ada konsep riil yang jelas, termasuk dengan model pelayanan yang diberikan. Cara yang coba dilakukan saat ini adalah memberikan pelayanan gratis bagi pasien rawat inap untuk semua lapisan warga bila dirawat di kelas III di seluruh rumah sakit pemerintah.

Warga cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan pelayanan ini. "Untuk proses berikutnya, pemerintah akan mencetak kartu khusus. Sementara bisa pakai KTP," ujar Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr M Saad Bustan MKes, saat menjadi narasumber diskusi rutin Tribun di kantor Tribun, Makassar, Jumat (18/7).

Saad menjadi narasumber bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, dr Muh Akbar SpS PhD, terkait dengan implementasi program kesehatan gratis pada 101 hari kepemimpinan Syahrul-Agus.

Sedangkan dr Akbar menjelaskan, filosofi dari sistem pelayanan kesehatan gratis yang utama adalah mencegah orang sakit. "Saya pernah mencari data di Askes Makassar untuk mengetahui klaim asuransi untuk membayar orang yang sakit. Di RS Wahidin, pembayaran Askes mencapai Rp 80 miliar per tahun," jelasnya.

Bila pemerintah bisa menurunkan angka 10 persen pasien agar tidak di-opname, berarti akan terjadi penghematan Rp 800 juta.

Maka salah satu usulan alumnus program doktor Hiroshima University, Jepang, terkait sosialisasi sistem pendidikan gratis adalah konsep dokter keluarga.

Konsep ini sudah diterapkan di Palembang (Sumatera Selatan), Bontang (Kalimantan Timur), dan Sulawesi Barat (Sulbar).

Satu dokter bertugas dibayar dengan sistem kapitasi. Misalnya, satu dokter mendapat jatah 2.000 pasien. Sang dokter mendapat anggaran tetap untuk tugas tersebut. "Jadi dokter ini berusaha agar warga yang masuk dalam daftarnya tetap sehat," jelas dosen Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Unhas ini

Aset

Akbar juga mengungkapkan, konsep kesehatan masih dimaknai dengan obat-obatan, interaksi dengan dokter, dan rumah sakit.

"Padahal sistem kesehatan gratis itu dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya kampanye olahraga setiap hari maupun kerja sosial," ujarnya.

Dia juga memberi contoh bagaimana Pemerintah Jepang sangat menghargai kesehatan warga negaranya. Sejak dipastikan hamil, pemerintah memberikan subsidi kepada si ibu berupa dua botol susu per hari.

"Di Jepang, siapapun yang memeriksa pertama dan mendiagnosa kehamilan seorang ibu, maka dia harus melapor ke kantor kecamatan untuk menginput datanya. Keesokan harinya, ibu hamil tersebut sudah mendapat subsidi susu gratis," jelas Akbar.

Menurutnya, Pemerintah Jepang menganggap warganya adalah aset sehingga setiap warga negara bisa menghasilkan devisa. Proses kelahirannya pun harus dijaga agar tetap normal. "Coba bayangkan, seandainya pola pikir penyelenggara negara seperti itu

maka tidak ada orang Indonesia yang tersia-siakan hidupnya. Negara berusaha membuat warganya sehat agar bisa berproduksi dan menghidupkan perekonomian," tambahnya.

Program Bertahap

Sesaat setelah pelantikannya sebagai gubernur, Syahrul menyebut sistem kesehatan gratis akan diterapkan secara bertahap. Tahun 2008-2009 tahap uji coba.

Kemudian dilanjutkan tahap pematapan hingga 2011. Tahun akhir jabatannya, program ini memasuki fase pematapan. "Gubernur selalu mengatakan konsep ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan dilakukan secara bertahap," kata Saad.

Jumat, 18-07-2008 | 10:18:33

Puskesmas Mattirotasi Ulang Pertama Sosialisasi Kesehatan Gratis

Laporan: Rasmi Ridjang Sikati. tribuntimurcom@yahoo.com

Maros,

Tribun - Ulang tahun (Ulang) pertama Puskesmas Mattirotasi dirangkaikan dengan sosialisasi kesehatan gratis kepada masyarakat. Puskesmas yang berada di Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru itu merayakan ulthanya dengan sangat sederhana.

Acara itu dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Maros Firman Jaya beserta stafnya. Turut pula hadir para undangan seperti pejabat lintas sektor, kepala desa/kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

Kepala Puskesmas Mattirotasi HS Jamaluddin ASS mengatakan jika dirinya juga mengundang sejumlah organisasi kepemudaan untuk memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama satu tahun.

Organisasi kepemudaan yang hadir itu seperti HPPMI, FAWMB, FPPM serta pengurus Lembaga Kajian Intelektual Maros (LeKaM).

"Kamis sosialisasikan pula kesiapan puskesmas untuk melaksanakan program kesehatan gratis bagi masyarakat umum yang telah berjalan efektif sejak tanggal 1 Juli lalu karena masih banyak masyarakat belum mengerti," katanya. (*)

Kamis, 17-07-2008

Kesehatan Gratis Masih Bingung soal DanaJelang 101 Hari Kepemimpinan Syahrul-Agus (3)

Meskipun Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan pasangannya, Agus Arifin Nu'mang, telah mencanangkan program kesehatan gratis di seluruh pelosok Sulsel, toh program masih menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola rumah sakit (RS).

Pertanyaan yang sering muncul di kalangan para pengelola RS adalah bagaimana agar anggaran untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu bisa cair secepatnya, mengingat selama ini anggaran yang dikeluarkan masih berasal dari RS itu sendiri.

Kendala lain yang dihadapi adalah banyaknya pasien lintas daerah. Pasien-pasien ini secara langsung mengurangi jatah pasien yang berada di kota tempat rumah sakit tersebut. Pihak RS yang merawat mereka belum bisa mengklaim biaya perawatan ke kabupaten asal pasien tersebut karena petunjuk teknis mengenai hal itu belum ada.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Saad Bustan, Rabu (16/7), mengatakan, petunjuk teknis tersebut sebenarnya sudah ada. Pihaknya masih menunggu untuk melakukan penggandaan ke seluruh rumah sakit dan puskesmas di Sulsel.

"Terus terang kami masih terkendala dana sosialisasi. Saat dana itu belum ada jadi kami juga belum bisa bergerak banyak," ujar Saad.

Pada tahun 2008 ini, hingga enam bulan ke depan, Dinas Kesehatan Sulsel membutuhkan sedikitnya Rp 100 miliar lebih untuk membiayai seluruh klaim dari rumah sakit negeri dan puskesmas yang telah menerapkan program pelayanan kesehatan gratis di Sulsel.

Sayangnya, anggaran tersebut belum bisa dicairkan karena memang tidak dianggarkan di Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Sulsel awal 2008 lalu.

Rencananya, anggaran untuk pelayanan kesehatan gratis akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan yang baru akan dibicarakan pada Agustus atau September mendatang.

Secara umum, dinas kesehatan menyebut bahwa program tersebut sukses di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel.

Indikasinya, selama program itu dijalankan, tidak ada protes dan keluhan dari masyarakat yang berobat meski pihak rumah sakit harus berpikir pengembalian anggaran mereka yang terlanjur dikuras untuk program tersebut.

Saad mengatakan, meski yang disebut-sebut oleh gubernur adalah 14 item, namun pada kenyataannya di lapangan jumlahnya lebih banyak dari jumlah itu.

Karena beberapa item lain seperti pengadaan kartu pasien, pemeriksaan dan pencabutan gigi, serta pelayanan lainnya, juga ternyata harus digratiskan.

"Pada prinsipnya kami mau secara keseluruhan gratis. Tapi memang kita juga mesti menyesuaikan kemampuan dana yang ada. Itu makanya kita mau belajar dulu," ujar Saad.